

**ANALISIS YURIDIS PERANAN SIDIK JARI GUNA TINGKAT PEMBUKTIAN  
DALAM TINGKAT PENYIDIKAN PENANGANAN  
PERKARA PEMBUNUHAN  
(Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)**

Haslauddin Siregar \*  
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum \*\*  
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N \*\*\*

**ABSTRAK**

Alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan, bagaimana peranan sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan, bagaimana hambatan serta bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam proses pembuktian sidik jari pada tahap penyidikan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan ke Polrestabes Medan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Peranan sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana adalah penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana karena sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian sidik jari di pengadilan antara lain faktor intern yaitu terbatasnya petugas identifikasi yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (*professional*) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP. Faktor ekstern yaitu yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat dilakukan secara intern yaitu peningkatan Sdm, peningkatan sarana prasarana sedangkan upaya eksternal perlu dilakukan edukasi dan pembelajaran terhadap masyarakat untuk mengetahui dan pentingnya menjaga TKP.

**Kata Kunci: Sidik Jari, Pembuktian, Pembunuhan**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF FINGERPRINTS FOR THE  
LEVEL OF EVIDENCE AT THE LEVEL OF INVESTIGATION IN  
HANDLING MURDER CASES  
(Case Study Of Medan Police)**

Haslauddin Siregar \*  
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum \*\*  
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N \*\*\*

**ABSTRACT**

*Fingerprint evidence is something that supports the judge's confidence at trial. Fingerprints will be developed by investigators in the process of investigation by identification officers as evidence and fingerprints found at the crime scene will be formulated so that they become documentary evidence in the form of fingerprint blanks.*

*The problems in this thesis are how to regulate fingerprint law in the evidence process at the investigation level, what is the role of fingerprints in the evidence process at the investigation level, what are the obstacles and what are the solutions for dealing with problems in the fingerprint evidence process at the investigation stage.*

*The research carried out is normative research and is supported by empirical juridical data, namely conducting field research at the Medan Police. The data analysis used is qualitative data.*

*Based on the research results, it is known that the legal regulation of fingerprints in the criminal justice evidentiary process is regulated in Article 184 paragraph (1) point (b) of the Criminal Procedure Code and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. The role of fingerprints in the criminal justice evidentiary process is important as evidence in criminal procedural law because fingerprints are used in the investigation process to reveal a criminal act and to simplify the investigation process and find the suspect through the steps that have been regulated in law, the main of which are cases where the suspect is not yet known (illegal cases). Obstacles faced in the process of proving fingerprints in court include internal factors, namely the limited number of identification officers who follow the identification profession so they are not proficient (professional) in the process of taking fingerprints at crime scenes. External factors, namely the most dominant, are the incomplete QUO status (genuineness of the crime scene), a factor that is often caused by people who want to know what happened. So the crime scene was contaminated. Efforts to overcome obstacles in implementing fingerprinting at crime scenes (TKP) can be done internally, namely increasing human resources, improving infrastructure, while external efforts need to be carried out by educating and teaching the public to know and understand the importance of protecting crime scenes..*

**Keywords:** *Fingerprints, Evidence, Murder.*

\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

\*\*Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

\*\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra